

**BATASAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILUKADA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RIKARDUS SIHURA

2102190084



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**BATASAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILUKADA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RIKARDUS SIHURA

2102190084



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIKARDUS SIHURA
NIM : 2102190084
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“BATASAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas ini dianggap batal.

Jakarta, 25 November 2025

RIKARDUS SIHURA

NIM: 2102190084



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**BATASAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA
DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)

Oleh:

Nama : Rikardus Sihura
NIM : 2102190084
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 November 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.

NIP/NIDN: 191643/0322117104

Pembimbing II

Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.

NIDK: 8953011024

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN: 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 November 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rikardus Sihura
NIM : 2102190084
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“BATASAN KEWENANGAN BAWASLU DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.

Sebagai Ketua

2. Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H.,

Sebagai Anggota

3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 25 November 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rikardus Sihura
NIM : 2102190084
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2025



Rikardus Sihura
NIM: 2102190084

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

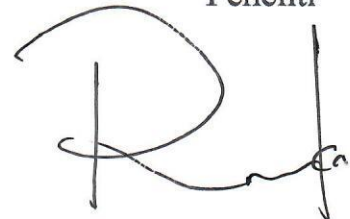
1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta para Wakil Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., dan Bapak Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing, saya merasa sangat beruntung memiliki pembimbing yang sangat sabar, bijaksana, dan penuh dedikasi seperti Anda. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang telah Anda berikan selama proses penyusunan tesis ini. Setiap masukan, kritik, dan saran yang Anda berikan sangat berharga bagi saya dan membantu saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi saya.

Setiap mata kuliah dan diskusi yang diadakan telah memberikan wawasan yang sangat berharga bagi saya.

7. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas dukungan, doa, dan cinta kasihnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
8. Saudara-saudara saya, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
9. Kepada Kakak Paskaria Tombi, yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada saya termasuk dukungan materil untuk melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum. Atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
10. Terimakasih kepada adinda Irving Jensen Zagoto yang telah menjadi teman diskusi yang baik serta telah membantu saya dalam proses penulisan tesis ini sejak awal hingga selesai.
11. Teman-teman mahasiswa Magister Hukum 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan di Magister Hukum.

Jakarta, 25 November 2025

Peneliti



Rikardus Sihura

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iv
Persetujuan Dosen Penguji Tugas Akhir	v
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Orisinalitas Penelitian	22
G. Sistematika Penelitian	27
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	 29
A. Kerangka Teoritis.....	29
1. Teori Kedaulatan Rakyat (<i>People's Sovereignty</i>)	29
2. Teori Demokrasi	35
B. Pemilihan Umum (Pemilu)	42
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	46
D. Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilukada.....	49
E. Sengketa Pemilukada	52
F. Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada	55
 BAB III : KEWENANGAN BAWASLU DAN MK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA	 57
A. Kewenangan Bawaslu	57
1. Proses pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilukada	61
2. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada di tingkat Bawaslu	64
3. Sifat Putusan Bawaslu	67

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	69
BAB IV : IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU DAN MK DALAM KASUS PEMILUKADA DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL	84
A. Duduk Perkara Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP XIX/2021 Atas Sengketa Pemilukada Bupati Boven Digoel.....	84
B. Implementasi Kewenangan Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilukada Khususnya di Pemilukada Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020	94
C. Implementasi Kewenangan MK Dalam Sengketa Proses Pemilukada Khususnya di Pemilukada Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.....	98
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul : **Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Bawaslu dan MK dalam penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, serta menganalisa implementasi kewenangan Bawaslu dan MK dalam kasus pemilihan Bupati di kabupaten Boven Digoel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan hukum maupun jurnal, serta kamus atau ensiklopedia. Menggunakan metode analisis pendekatan kajian dokumen hukum (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan kajian perbandingan hukum (*comparative law approach*) serta pendekatan kajian konseptual hukum (*conceptual law approach*) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh: (1) Bawaslu berwenang secara preventif dan represif menangani pelanggaran serta sengketa proses Pemilu, sedangkan MK menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu yang bersifat final. Keduanya bersifat saling melengkapi, namun sering terjadi tumpang tindih kewenangan ketika batas antara sengketa proses dan hasil tidak tegas, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan elektoral; (2) Kasus Pemilu Kabupaten Boven Digoel menunjukkan kompleksitas kewenangan Bawaslu dan MK. Bawaslu menjalankan fungsi adjudikasi administratif dengan mengoreksi keputusan KPU, yang menegaskan peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai lembaga *quasi-yudisial*. Sebaliknya, MK sebagai *guardian of the constitution* tidak hanya memeriksa sengketa hasil Pemilu, tetapi juga menilai konstitusionalitas proses Pemilu, khususnya pada tahap pencalonan. Pendekatan ini mencerminkan karakter MK yang mengedepankan keadilan substantif dan memandang sengketa Pemilu sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu, Kewenangan MK, dan Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

ABSTRACT

Title : Limits of Authority of the Election Supervisory Agency and the Constitutional Court in Resolving Election Disputes in Indonesia (Case Study of Constitutional Court Decision Number: 132/PHP.BUP-XIX/2020)

This study aims to determine the limits of the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Constitutional Court in resolving election disputes in Indonesia, as well as to analyse the implementation of the authority of Bawaslu and the Constitutional Court in the case of the regent election in Boven Digoel Regency.

The research method is the normative juridical method by examining primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, legal writings and journals, as well as dictionaries and encyclopaedias. The study utilised a legal document analysis approach (statute approach) combined with a comparative law approach and a conceptual law approach to the legal materials that had been processed.

The results of research is obtained that: (1) Bawaslu has preventive and repressive authority to handle violations and disputes in the regional election process, while the Constitutional Court resolves disputes over the final results of regional elections. The two bodies complement each other, but there is often an overlap of authority when the line between disputes over the process and disputes over the results is unclear, giving rise to issues of legal certainty and electoral justice; (2) The case of the Boven Digoel Regency election shows the complexity of the authority of Bawaslu and the Constitutional Court. Bawaslu performs an administrative adjudication function by correcting KPU decisions, which confirms that Bawaslu's role is not only as a supervisor but also as a quasi-judicial institution. Conversely, the Constitutional Court, as the guardian of the constitution, not only examines disputes over election results but also assesses the constitutionality of the election process, particularly at the nomination stage. This approach reflects the character of the Constitutional Court, which prioritises substantive justice and views election disputes as constitutional issues related to the legitimacy of power.

Keywords: Authority of the Election Supervisory Agency and the Authority of the Constitutional Court, and Regional Head Elections Disputes.